

Surat Kabar / Majalah : Jawa Pos

Tanggal : 11/8/04

Halaman : 31

Kolom : Metropolis

Subjek :

Kegiatan : Opini

# SBKRI, Dibakar Atau Dikeramatkan?



Oleh:  
FREDDY H. INSTANTO\*

**... "SBKRI, makhluk sakti apakah kamu? Presiden yang sedang bertahta pun berkali-kali membicarakannya. Ketua MPR Amien Rais juga pernah mendiskusikannya dengan warga Tionghoa di Surabaya. Tapi, semuanya menjadi sia-sia ketika praktek di lapangan masih saja bergumul dengan 'mahluk horor' bernama SBKRI..."**

**MEDIA** mana yang belum pernah menulis tentang SBKRI? Dari media cetak berskala nasional sampai media elektronik berskala lokal, semuanya sudah mengupasnya hingga tuntas. Sebuah radio interaktif di Surabaya pernah sehari-hari kecapaian membicarakan topik ini. Mulai dari janji capres-cawapres sampai serunya debat lokakarya, semuanya sudah sampai pada tingkat yang panas. Dari obrolan calo imigrasi sampai perdebatan melalui *mailing list* di internet, masalah SBKRI seolah tidak mau berhenti. Dari calon murid sekolah sampai Alan Budikusuma dan Susi Susanti, semua pernah jadi korbannya.

SBKRI, makhluk sakti apakah kamu? Presiden yang sedang bertahta pun berkali-kali membicarakannya. Ketua MPR Amien Rais juga pernah mendiskusikannya dengan warga Tionghoa di Surabaya. Tapi, semuanya menjadi sia-sia ketika praktek di lapangan masih saja bergumul dengan 'mahluk horor' bernama SBKRI.

Sikap-sikap keras sampai cerita kekonyol juga muncul dalam merespon masalah ini. Teddy Yusuf -satu-satunya

Jenderal dari suku Tionghoa juga mengalami hal yang sama. Ketika masih berpangkat rendah, dengan mengenakan seragamnya, tentara yang dulu bernama Himi Tek Ji ini mengurus sendiri akte kelahirannya. Upayanya pun membuahkan hasil. Anak pertama berstatus pribumi.

Tapi apa yang terjadi ketika mantan anggota Fraksi ABRI DPR RI tahun 1996 ini sudah berpangkat tinggi. Urusan surat menyurat akte kelahiran anaknya tidak sempat dia urus sendiri. Setelah selesai, barulah dia sadar bahwa anak keduanya berstatus WNI Keturunan.

Nuansa keras dan konyol juga terjadi pada acara Lokakarya Perspektif Peran WNI Pasca Pemilu 2004 pekan lalu. Acara yang digelar di hotel berbintang ini cukup istimewa, karena lebih fokus berbicara pada keberadaan SBKRI. *Backdrop* panggung bukan hanya bertuliskan judul acara,

Surat Kabar / Majalah :

Tanggal :

Halaman :

Kolom :

Subjek :

Kegiatan :

tetapi juga menuliskan secara rinci pasal-pasal hukum yang dinilai diskriminatif. Demikian juga kumpulan makalah yang hanya berisi sedikit tulisan para pembicara, tetapi sarat dengan copy surat-surat seperti Akta Kelahiran Golongan Tionghoa sebelum kemerdekaan, tahun 1953-1967, Pencatatan sipil, dan tentu ada juga SBKRI. Dari Lokakarya yang dibidani oleh PITI Jawa Timur, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya itu menampilkan pembicara Alvin Lie, yang konon tidak pernah bermasalah dengan urusan seperti ini. Tentu peserta seminar menggerutu, siapa yang berani dengan anggota DPR dari PAN yang vokal itu. Berbeda dengan HS Dylon yang juga merasakan terkena imbas diskriminasi.

Muncul juga usulan untuk melakukan demo ke DPR RI yang dilanjutkan dengan membakar SBKRI itu. Dahlan Iskan yang

juga diundang sebagai pembicara di pertemuan itu *nyeletuk*, "Ya boleh-boleh saja dibakar, tetapi yang bijaksana adalah SBKRI itu di copy dulu. SBKRI asli di simpan di rumah, sedang yang dibakar SBKRI yang hasil fotocopi saja".

Guyonan gaya Dahlan Iskan ini memang perlu dikembangkan dengan tulisan Ariel Heryanto di salah satu koran Jakarta (Mei 2004). Sungguh keramat sebenarnya SBKRI itu. Betapa berharganya surat yang menyatakan bahwa pemegang surat adalah bukti sah sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Sebab, lebih dari dua ratus juta penduduk Indonesia tidak mempunyai bukti sebagai warga negara. Bukti itu ternyata hanya dimiliki oleh mereka yang justru warga keturunan.

Seloroh itu jelas hanya selingan untuk melarikan diri dari kenyataan. Kesungguhan aparat pemerintahan dalam menjalankan

hukum secara benar tentu harus dibarengi sikap positif warga negaranya. Untuk aparat yang "kreatif" dengan mendekonstruksi SBKRI menjadi alat peras-memas, perlu disikapi dengan 'kengototan' dan kesadaran tentang hukum. Tidak dipungkiri bahwa perjalanan dipersulit puluhan tahun oleh oknum aparat membuat warga negara keturunan ini sudah biasa dengan mental ABC (Asal Bisa Cepat), 'win-win solution' serta 'cash and carry'.

Lepas dari itu semua, bertele-tele dengan hujat-menghujat lewat media atau internet, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Persoalan SBKRI adalah salah satu contoh genre korupsi. Masih banyak buntutnya yang lain seperti urusan KTP, KSK, SIM, HGB, SIUP, bahkan sulit disebutkan satu-persatu.

Yang jelas, dari pemerintah perlu sebuah sikap politik tegas tentang penegakan hukum (*top-*

*down*). Sedang dari bawah (*bottom-up*) perlu sikap positif seperti siap *rekoso* atau siap *repot* hingga keseriusan (untuk *ngotot*) terhadap aparat. *People power* perlu digerakkan agar masalah semacam ini segera terselesaikan.

"*Easy said than done*," kata orang. Menyelesaikan masalah ini memang tidak mudah. Jangankan hukum dunia, hukum agama saja dilanggar. Itulah yang terjadi saat ini. Saya tertarik pada sebuah kata-kata bijak yang barang kali perlu direnungkan. Bunyinya seperti ini; *Sengaja membiarkan sama saja dengan melakukan*. Ketika kita membiarkan sebuah penyimpangan terjadi, maka sama saja kita ikut melakukan penyimpangan itu. Menarik juga untuk mengutip salah satu bait lagu penyanyi terkenal, Broery Marantika; "Engkau begitu, aku begini. Sama saja."

\*) Penulis adalah dosen Jurusan Arsitektur UK Petra